

**ANALISIS KETIMPANGAN, PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PENGANGGURAN
KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA**



Disertasi Oleh:

**DIKKO ALRAKHMAN
01013681722002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2022

**ANALISIS KETIMPANGAN, PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN PENGANGGURAN
KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA**



Disertasi Oleh:

**DIKKO ALRAKHMAN
01013681722002**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Doktor
pada
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan Ekonomi Pembangunan Kawasan

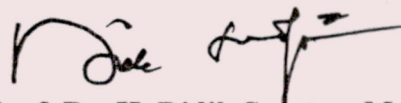
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

JUNI 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Analisis Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengangguran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera
Nama Mahasiswa : Dikko Alrahman
NIM : 01013681722002
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Ekonomi Pembangunan Kawasan

Menyetujui,
Promotor,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 19600710 198703 1 003

Co Promotor 1,

Co Promotor 2,



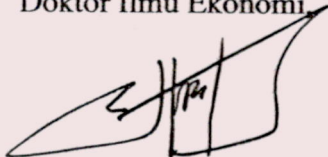
Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si

NIP. 19681224 199303 1 002

Dr. Azwardi, S.E., M.Si

NIP. 19680518 199303 1 003

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi



Dr. Suhel, S.E., M.Si

NIP. 19661014 199203 1 003

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E

NIP. 19670624 199402 1 002

Tanggal Lulus: 29 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikko Alrahman
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukadana, 16 Desember 1991
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
NIM : 01013681722002

Menyatakan bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah.

Palembang, 30 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Dikko Alrahman
Dikko Alrahman
NIM. 01013681722002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikko Alrahman
NIM : 01013681722002
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Ekonomi Pembangunan Kawasan

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi saya yang berjudul “Analisis Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera” bebas dari plagiat dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah tersebut terdapat indikasi plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Dikko Alrahman
NIM. 01013681722002

"ANALISIS KETIMPANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA"

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.sties-aceh.ac.id Internet Source	2%
2	beritadaerah.co.id Internet Source	1%
3	repository.ung.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Judul disertasi ini adalah “Analisis Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”.

Disertasi ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel yang merupakan kombinasi data *cross section* yaitu 154 daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera dengan data *time series* yaitu sepuluh tahun (2011-2020). Pokok bahasan yang terkandung dalam disertasi ini di antaranya mengenai hubungan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, desentralisasi fiskal, penduduk, perdagangan, sektor basis, sumber daya alam dan daerah pemekaran terhadap ketimpangan; hubungan pengaruh ketimpangan, pengangguran, angkatan kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi; dan hubungan pengaruh ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan inflasi terhadap pengangguran. Adapun saran operasional kebijakan dari hasil penelitian adalah diharapkan agar Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera, instansi swasta, dunia usaha/investor dan organisasi non Pemerintah lainnya dapat berfokus serta berperan/berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, meningkatkan akses pekerjaan yang lebih luas bagi penduduk produktif, serta meningkatkan investasi daerah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 30 Juni 2022

Penulis,



Dikko Alrahman

NIM. 01013681722002

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan disertasi ini penulis banyak menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan sehingga penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan disertasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Suhel, S.E., M.Si selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, selaku Promotor, Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si selaku Co-Promotor I, dan Bapak Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Co-Promotor II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini, memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan.
4. Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. (Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala), Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc., dan Bapak Dr. Sukanto, SE., M.Si. selaku penguji naskah disertasi ini, yang telah memberikan saran-saran perbaikan guna membuat disertasi menjadi lebih baik.
5. Keluarga tercinta: Bapak Makruf, S.IP, M.M. dan Ibu Nuraini tercinta yang telah memberikan ilmu, nasihat, perhatian, motivasi, dan doa kepada buah hatinya. Adik-adikku tersayang Afri Kurniawan, Nurmalia Ramadhona, dan Widya Agustri Putri yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk kakaknya.
6. Istri tercinta Mega Yenuarisa, S.Tr.Keb., yang selalu menemani di saat-saat dibutuhkan, dan selalu memberikan semangat dan doa. Anak-anak kami tersayang M. Thoriq Makruf dan Muhammad Arsyah, yang selalu memberikan semangat bagi penulis.

7. Rekan-rekan Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir di Bidang Sosial Budaya dan Sekretariat, yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan penyusunan disertasi.
8. Teman-teman mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi angkatan 2017 Program Studi S3 Ilmu Ekonomi FE Unsri (Kak Eka, Yuk Fauzia dan Yuk Emilia), yang telah memberikan *support*, semangat dan motivasi untuk penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 30 Juni 2022

Penulis,



Dikko Alrahman

NIM. 01013681722002

ABSTRAK

Analisis Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Oleh:

Dikko Alrahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran (variabel endogen) serta variabel eksogen lain yang mempengaruhinya di Pulau Sumatera. Data yang digunakan merupakan data panel dengan 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatera selama sepuluh tahun (2011-2020), dan teknik pengolahan data yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan terdapat hubungan dua arah yang berkorelasi negatif dan signifikan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera; dan adanya kausalitas dua arah yang juga berkorelasi negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Sementara, hubungan antara variabel ketimpangan dengan pengangguran di Pulau Sumatera tidak signifikan. Kontribusi yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan ketimpangan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera.

Kata Kunci: *Ketimpangan, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran, Pulau Sumatera*

ABSTRACT

An Analysis on Inequality, Economic Growth, and Unemployment of Regency/City in Sumatera Island

By:

Dikko Alrakhman

This study analyzed the relationship between inequality, economic growth, unemployment (endogenous variables), and other exogenous variables affecting the relationship. The panel data included 154 cities and regencies in Sumatera Island for ten consecutive years (2011-2020). Data were analyzed using simultaneous equations models for econometrics. Our findings confirmed (1) a negatively correlated, significant, and simultaneous two-way relationship between inequality and growth and (2) a negatively correlated and significant two-way causality between economic growth and unemployment. However, the relationship between inequality and unemployment was not significant. Our findings will be helpful to make better policies to reduce inequality and unemployment and encourage economic growth, especially for the local governments in Sumatera Island.

Keywords: *Inequality, Economic Growth, Unemployment Rate, Sumatera Island*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	22
1.3. Tujuan Penelitian.....	23
1.4. Manfaat Penelitian.....	24
1.4.1. Manfaat Akademis	24
1.4.2. Manfaat Praktis.....	24
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	26
2.1. Landasan Teori	26
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	26
2.1.2 Konsep Ketimpangan Wilayah.....	33
2.1.3 Konsep Pengangguran.....	49
2.2 Penelitian Terdahulu.....	58
2.3 Kerangka Pikir.....	84
2.4 Hipotesis Penelitian	89
2.5 Orisinalitas Penelitian.....	90

BAB III METODE PENELITIAN	92
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	92
3.2. Rancangan Penelitian	92
3.3. Jenis dan Sumber Data	94
3.4. Teknik Analisis.....	94
3.4.1. Identifikasi Model Persamaan Simultan.....	97
3.4.2. Estimasi Parameter Fungsi	103
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	103
3.6. Pengujian Hipotesis	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	116
4.1. Hasil Penelitian.....	116
4.1.1. Pengujian Model Penelitian.....	116
4.1.2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	120
4.1.3. Hasil Estimasi Model Penelitian	122
4.1.3.1 Estimasi Model Ketimpangan.....	122
4.1.3.2 Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi	128
4.1.3.3 Estimasi Model Pengangguran.....	132
4.2. Pembahasan	136
4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengaruh Pengangguran, Desentralisasi Fiskal, Penduduk, Perdagangan, Sektor Basis, Sumber Daya Alam, dan Pemekaran Daerah Terhadap Ketimpangan.....	136
4.2.1.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan	137
4.2.1.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Ketimpangan ...	140
4.2.1.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan	141
4.2.1.4 Pengaruh Penduduk Terhadap Ketimpangan	145
4.2.1.5 Pengaruh Perdagangan Terhadap Ketimpangan	150
4.2.1.6 Pengaruh Sektor Basis Terhadap Ketimpangan.....	154

4.2.1.7 Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Ketimpangan	157
4.2.1.8 Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Ketimpangan	162
4.2.2 Pengaruh Ketimpangan, Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	166
4.2.2.1 Pengaruh Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	167
4.2.2.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	170
4.2.2.3 Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	173
4.2.2.4 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	179
4.2.3 Pengaruh Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Inflasi Terhadap Pengangguran.....	182
4.2.3.1 Pengaruh Ketimpangan Terhadap Pengangguran ...	182
4.2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran	183
4.2.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Pengangguran.....	187
4.2.3.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran	191
4.2.4 Hubungan Pengaruh Antara Variabel Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran	194
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	199
5.1 Kesimpulan.....	199
5.2 Saran-Saran.....	200
5.2.1 Saran Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan	200
5.2.2 Saran Bagi Operasional Kebijakan.....	201
DAFTAR PUSTAKA	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, PDRB per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2016-2020.....	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020.....	7
Tabel 1.3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Rupiah).....	12
Tabel 1.4	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	17
Tabel 3.1	Hasil Identifikasi Persamaan Struktural dengan <i>Order Condition</i>	99
Tabel 3.2	Hasil Identifikasi Persamaan Struktural dengan <i>Rank Condition</i>	100
Tabel 3.3	Variabel Penelitian	112
Tabel 4.1	Hasil <i>Hausman Test</i> untuk Pengujian Simultanitas	118
Tabel 4.2	Hasil Uji Endogenitas Model Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran	120
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Model Ketimpangan.....	123
Tabel 4.4	Hasil Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi	128
Tabel 4.5	Hasil Estimasi Model Pengangguran	132
Tabel 4.6	Daftar Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Menurut Pengelompokan Variabel Sektor Basis (Daerah NonPertanian dan Daerah Pertanian)	156

Tabel 4.7	Daftar Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Menurut Pengelompokkan Variabel Sumber Daya Alam (Daerah Migas dan Daerah NonMigas)	160
Tabel 4.8	Daftar Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Menurut Pengelompokkan Variabel Pemekaran Daerah (Daerah Pemekaran dan Daerah Induk)	165
Tabel 4.9	Ringkasan Nilai Koefisien dan Signifikansi Hubungan Antara Variabel Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020	9
Gambar 2.1	Kurva Kuznets.....	34
Gambar 2.2	Kurva Lorenz	40
Gambar 2.3	Kekakuan Upah dan Ketidakseimbangan Pasar Tenaga Kerja.....	51
Gambar 2.4	Kerangka Pikir	88
Gambar 3.1	Ranah Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis pada Alur Penelitian.....	93
Gambar 4.1	Persebaran Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Berdasarkan Kondisi Tingkat Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	139
Gambar 4.2	Rata-Rata Tingkat Ketimpangan dan Jumlah Realisasi Belanja Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2020	144
Gambar 4.3	Tingkat Ketimpangan Rata-Rata dan Laju Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020	147
Gambar 4.4	Distribusi Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020	149
Gambar 4.5	Rata-Rata Tingkat Ketimpangan dan Jumlah Ekspor Neto Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2020.....	153

Gambar 4.6	Persebaran Daerah Kabupaten/Kota Basis Sektor Pertanian dan Nonpertanian di Pulau Sumatera Berdasarkan Kondisi Tingkat Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi	155
Gambar 4.7	Tingkat Ketimpangan Rata-Rata dan Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Daerah Migas dan Daerah NonMigas Tahun 2011-2020	159
Gambar 4.8	Tingkat Ketimpangan Rata-Rata dan Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Daerah Pemekaran dan Daerah Induk Tahun 2011-2020	164
Gambar 4.9	Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata dan Tingkat Ketimpangan Rata-Rata Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020.....	169
Gambar 4.10	Persebaran Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Berdasarkan Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran.....	172
Gambar 4.11	Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata dan Jumlah Penduduk Bekerja Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020	175
Gambar 4.12	Persebaran Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Berdasarkan Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk yang Bekerja	177
Gambar 4.13	Rata-Rata Rasio PMTB Terhadap PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020	181
Gambar 4.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020	186

Gambar 4.15	Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020	188
Gambar 4.16	Persebaran Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di Pulau Sumatera Berdasarkan Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran.....	190
Gambar 4.17	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Inflasi Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020.....	193
Gambar 4.18	Tingkat Ketimpangan Rata-Rata, Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata, dan Tingkat Pengangguran Rata-Rata Seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2011-2020.....	196

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Jumlah Penduduk, PDRB, dan PDRB per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 |
| Lampiran 2 | Nilai Ekspor, Impor dan Ekspor Netto Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) |
| Lampiran 3 | Peta Persebaran Basis Sektor Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2020 |
| Lampiran 4 | Pembentukan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera |
| Lampiran 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 (Persen) |
| Lampiran 6 | Inflasi dan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 |
| Lampiran 7 | Hasil Regresi Simultan |
| Lampiran 8 | Hasil Uji Hausman |
| Lampiran 9 | Daftar Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2006). Meskipun pertumbuhan ekonomi adalah dasar untuk meningkatkan pendapatan nasional, hal tersebut tidak selalu menghasilkan distribusi atau pengurangan kemiskinan yang lebih baik. Akibatnya, kebijakan yang hanya berkonsentrasi pada pertumbuhan hanya melihat sebagian dari masalah pembangunan (Klasen, 2005). Sementara, menurut Richardson (1977) kesenjangan wilayah muncul karena adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan, di mana proses pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada sulitnya pemerataan pembangunan.

Kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan masalah universal karena pada tingkat apa pun kesenjangan selalu ada yang disebabkan oleh perbedaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Meskipun ketimpangan wilayah dan distribusi pendapatan bersifat "alamiah" dan universal yang tidak dapat dihindari, kondisi tersebut dapat diubah melalui proses pembangunan dan kebijakan (Kuncoro, 2004). Shankar & Shah (2003) menyebutkan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan suatu perkembangan

yang selalu ada di berbagai negara, terutama pada negara dengan geografis dan wilayah yurisdiksi yang luas.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Ketimpangan tersebut terjadi karena sektor-sektor utama daerah hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja (Soenandar, 2005). Fleisher, *et. al.* (2010) mengatakan bahwa faktor penentu kesenjangan antar wilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Sementara, Cherodian & Thirlwall (2015) menyebutkan ketimpangan antar wilayah akan mengakibatkan migrasi penduduk yang bekerja dan berpindahnya modal dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang maju.

Secara umum, hasil studi mengenai ketimpangan di Indonesia yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Bahkan, ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia lebih tinggi di antara negara-negara berkembang (Akita, 1988).

Williams, *et. al.* (2003) menyatakan bahwa salah satu pemicu ketimpangan distribusi pendapatan adalah disparitas regional. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan perbedaan struktur perekonomian terkait dengan beragamnya faktor *endowment* yang dimiliki. Hal ini mendorong timbulnya masalah disparitas kinerja perekonomian regional yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di mana *output* provinsi yang lebih kaya dengan faktor *endowment* dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lebih langka faktor *endowment*-nya.

Fenomena perbedaan kinerja perekonomian regional dapat dilihat dari adanya perbedaan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar pulau di Indonesia. Pada tahun 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 10.722 triliun rupiah, sedangkan nilai PDB per kapita sebesar 39,557 juta rupiah. Nilai PDB tersebut dibentuk dari angka *output* seluruh provinsi di Indonesia.

Selama kurun waktu antara tahun 2016-2020 Pulau yang memiliki angka PDRB per kapita di atas PDB per kapita hanya ada 2 pulau yaitu Pulau Kalimantan dan Jawa. Sementara, pulau lainnya memiliki nilai PDRB per kapita di bawah PDB per kapita. Pulau Kalimantan memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu sebesar 53,560 juta rupiah di tahun 2020, sedangkan PDRB per kapita terkecil tahun 2020 adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai sebesar 20,576 juta rupiah. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat atau pendapatan masyarakat di suatu daerah. Adanya perbedaan kondisi nilai PDRB per kapita antar pulau menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan atau disparitas antardaerah di Indonesia. Namun demikian, ternyata tidak hanya PDRB per kapita yang menunjukkan kondisi disparitas tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran antar pulau di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang beragam. Güçlü (2017) menyebut pengangguran sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang paling penting.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, PDRB per
Kapita, dan Tingkat Pengangguran Menurut Pulau di Indonesia
Tahun 2016-2020

Uraian	Pulau						Indonesia
	Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku dan Papua	
Pertumbuhan Ekonomi (%)							
Tahun 2016	4,28	5,60	5,91	2,00	7,41	7,41	5,03
Tahun 2017	4,28	5,62	3,69	4,34	6,95	4,89	5,07
Tahun 2018	4,52	5,70	2,67	3,84	8,95	6,98	5,17
Tahun 2019	4,55	5,48	5,03	4,99	6,96	-7,44	5,02
Tahun 2020	-1,19	-2,51	-5,01	-2,27	0,23	1,44	-2,07
PDB/PDRB (Miliar Rupiah)							
Tahun 2016	2.044.984	5.545.720	291.499	807.896	563.958	244.777	9.434.613
Tahun 2017	2.132.579	5.857.508	302.267	842.972	603.147	256.751	9.912.928
Tahun 2018	2.229.071	6.191.172	310.351	875.369	657.105	274.669	10.425.852
Tahun 2019	2.330.579	6.530.684	325.950	919.007	702.810	254.246	10.949.038
Tahun 2020	2.302.731	6.367.054	309.626	898.174	704.423	257.903	10.722.443
PDB/PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)							
Tahun 2016	36.440	37.809	20.385	51.672	29.724	34.957	36.469
Tahun 2017	37.446	39.531	20.861	52.937	31.383	35.987	37.851
Tahun 2018	38.589	41.375	21.145	54.002	33.764	37.800	39.341
Tahun 2019	39.798	43.232	21.930	55.725	35.676	34.369	40.843
Tahun 2020	38.808	41.765	20.576	53.560	35.338	34.260	39.557
Tingkat Pengangguran (%)							
Tahun 2016	5,43	6,16	3,02	5,51	4,21	4,78	5,61
Tahun 2017	5,20	6,00	2,69	5,04	4,94	5,41	5,50
Tahun 2018	5,11	5,86	2,59	4,70	4,45	4,54	5,30
Tahun 2019	5,04	5,77	2,68	4,61	4,24	4,77	5,23
Tahun 2020	6,14	8,09	4,69	5,52	5,45	5,50	7,07

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021 dan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 pada tahun 2020 terdapat pulau yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi yaitu Pulau Jawa dengan angka sebesar 8,09%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran Pulau lainnya dan bahkan di atas angka pengangguran Indonesia (7,07%). Sementara, tingkat pengangguran terendah ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 4,69% di tahun 2020. Di sisi lain, pada indikator pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarpulau. Ada pulau yang mengalami pertumbuhan ekonomi yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku dan Papua, sedangkan pulau lainnya tidak mengalami pertumbuhan ekonomi.

Di pihak lain, hadirnya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat (SMERU, 2021). Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan konkret untuk menangani pandemi COVID-19 yang pada akhirnya mengurangi frekuensi mobilitas masyarakat dan kegiatan tidak berjalan normal sebagaimana sebelum datangnya pandemi COVID-19. Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistik (2021) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia di pertengahan tahun 2020 mencapai sebesar 7,07%, meningkat 1,84 poin persen dibandingkan dengan tahun 2019. Kinerja tingkat pengangguran di tahun 2020 tersebut dapat dikatakan relatif cukup tinggi meskipun masih di bawah 10%. Lebih lanjut, BPS (2020) juga mendokumentasikan fakta bahwa terdapat 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang). Sejalan dengan kondisi pengangguran Indonesia yang meningkat tersebut, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kemerosotan yang cukup signifikan hingga pada level -2,07 persen. Artinya perekonomian Indonesia di tahun 2020 tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami resesi yang secara makro juga dipicu oleh situasi muncul dan berkembangnya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami resesi, salah satu pulau yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah Pulau Sumatera dengan kontraksi sebesar -1,19%. Selain itu, selama kurun waktu antara tahun 2016-2020 angka pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera relatif berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, capaian PDRB per kapita Pulau Sumatera juga lebih rendah dari PDB per kapita selama periode tersebut. Sementara, jika dilihat dari indikator tingkat

pengangguran ternyata tingkat pengangguran Pulau Sumatera relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 5,38% dalam periode tahun 2016-2020, hampir mendekati angka rata-rata pengangguran Indonesia (5,74%). Capaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan masih menghadapi permasalahan pengangguran.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di
Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

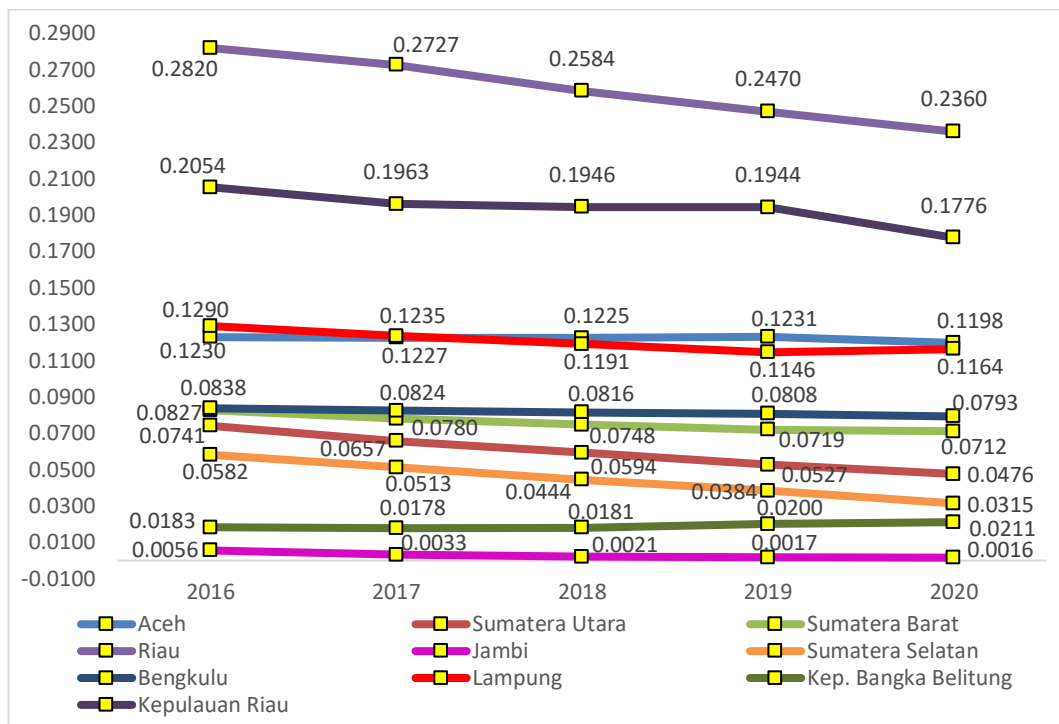
No.	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)					Tingkat Pengangguran (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	7,57	6,57	6,34	6,17	6,59
2	Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07	5,84	5,60	5,55	5,39	6,91
3	Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60	5,09	5,58	5,66	5,38	6,88
4	Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,12	7,43	6,22	5,98	5,76	6,32
5	Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46	4,00	3,87	3,73	4,06	5,13
6	Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	4,31	4,39	4,27	4,53	5,51
7	Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,30	3,74	3,35	3,26	4,07
8	Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67	4,62	4,33	4,04	4,03	4,67
9	Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30	2,60	3,78	3,61	3,58	5,25
10	Kepulauan Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80	7,69	7,16	8,04	7,50	10,34
	Sumatera	4,28	4,28	4,52	4,55	-1,19	5,43	5,20	5,11	5,04	6,14
	Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, 2021; dan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020, 2020 (diolah)

Di sisi lain, indikasi ketimpangan tidak hanya terjadi antar pulau di Indonesia tetapi juga antar provinsi di Pulau Sumatera. Angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran antar provinsi di Pulau Sumatera cenderung

bervariasi dalam periode tahun 2016-2020, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2. Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Pulau Sumatera relatif dapat dikatakan timpang karena ada daerah yang memiliki pertumbuhan sangat rendah (kisaran 1%) dan ada daerah yang pertumbuhannya lebih dari 6%. Bahkan di tahun 2020 seluruh provinsi tidak ada yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga terjadi pada capaian tingkat pengangguran, di mana ada daerah yang memiliki tingkat pengangguran di bawah 3% dan ada daerah dengan tingkat pengangguran melebihi 10% selama periode 2016-2020.

Selanjutnya, tingkat ketimpangan di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh angka Indeks Williamson. Jika nilai Indeks Williamson semakin tinggi mendekati angka 1 maka artinya tingkat ketimpangan di suatu daerah semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai Indeks Williamson semakin rendah mendekati angka 0 maka artinya tingkat ketimpangan di suatu daerah semakin rendah. Nilai Indeks Williamson antarprovinsi di Pulau Sumatera dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020 dapat dikatakan cukup timpang. Dikatakan demikian karena ada provinsi dengan Indeks Williamson yang tinggi seperti Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (lebih dari 0,2). Sementara, di sisi lain ada provinsi dengan indeks Williamson yang rendah seperti Provinsi Jambi (berkisar 0,001) dan Kepulauan Bangka Belitung (berkisar 0,02). Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia 2017-2021, 2017-2021

Gambar 1.1

Indeks Williamson Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020

Tingkat ketimpangan yang beragam antar provinsi di Pulau Sumatera dapat ditentukan oleh kondisi masing-masing daerah baik secara geografis maupun demografis. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di suatu daerah. Apabila dilihat dari jumlah penduduk setiap provinsi di Pulau Sumatera terlihat sangat bervariasi. Ada daerah dengan jumlah penduduk yang besar seperti Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 14,798 juta jiwa pada tahun 2020, dan ada daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 1,469 juta jiwa. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1.

Di samping adanya perbedaan jumlah penduduk, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami perbedaan dalam hal pendapatan yang dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Nilai PDRB per kapita tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2016-2020 dengan angka rata-rata sebesar 80,471 juta rupiah, sementara provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan rata-rata sebesar 22,999 juta rupiah dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020. Selain itu, dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera ternyata hanya terdapat tiga provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita di atas nilai PDRB per kapita Pulau Sumatera dalam periode tahun 2016-2020 yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Dengan demikian, perbedaan kondisi perekonomian yang cukup signifikan antardaerah di Pulau Sumatera mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah.

Thornton (2007) menyebut bahwa penurunan disparitas pendapatan antardaerah salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan karena kebijakan ditentukan sesuai dengan potensi setiap daerah dan lebih mampu memperhitungkan kondisi regional dalam penyediaan barang-barang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara, menurut Brodjonegoro (2003) desentralisasi fiskal merupakan perwujudan dari '*money follow function*' dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Semangat yang mendasari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk lebih

mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kebijakan pembangunan yang terpusat pada era sebelumnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan termasuk salah satunya kesenjangan pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, orientasi lainnya dari desentralisasi fiskal adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Jika melihat kondisi fiskal provinsi-provinsi di Pulau Sumatera baik dari sisi anggaran pendapatan daerah maupun belanja daerah, maka kecenderungannya cukup bervariasi antardaerah. Dari sisi belanja daerah, terlihat bahwa kemampuan pengeluaran atau belanja daerah antarprovinsi di Pulau Sumatera relatif beragam baik untuk komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Umumnya sebagian besar belanja daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dialokasikan pada belanja tidak langsung. Jika dilihat secara besaran realisasi anggaran maka pada tahun 2020 provinsi dengan belanja daerah terbesar adalah Provinsi Aceh dengan realisasi anggaran mencapai 13,242 triliun rupiah. Sementara terdapat provinsi dengan kemampuan belanja yang kecil yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan anggaran sebesar 2,575 triliun rupiah. Adapun rata-rata anggaran belanja daerah seluruh provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020 adalah sebesar 7,052 triliun rupiah.

Tabel 1.3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Rupiah)

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah						Belanja Daerah			
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan				Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Jumlah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
			DBH Pajak	DBH Bukan Pajak/ SDA	DAU	DAK					
1	Aceh	2.570.775.877	127.272.936	414.312.570	1.956.492.796	1.762.270.402	7.608.795.976	14.439.920.557	7.772.191.996	5.470.020.806	13.242.212.802
2	Sumatera Utara	5.531.237.379	426.453.173	42.230.415	2.474.465.343	4.404.599.181	37.374.259	12.916.359.750	9.192.545.413	3.461.062.021	12.653.607.434
3	Sumatera Barat	2.255.072.987	127.288.301	18.332.663	1.891.323.979	1.965.523.937	106.523.889	6.364.065.756	4.412.967.831	1.995.325.958	6.408.293.789
4	Riau	3.333.176.033	757.212.988	1.075.685.391	1.432.349.278	2.000.906.541	23.494.618	8.622.824.849	5.133.319.819	3.039.386.656	8.172.706.475
5	Jambi	1.535.183.486	157.683.636	286.925.939	1.288.418.327	1.116.093.491	16.319.493	4.400.624.372	2.986.488.749	1.443.904.002	4.430.392.751
6	Sumatera Selatan	3.375.100.985	851.548.469	1.081.720.900	1.568.602.615	2.333.802.709	67.744.382	9.278.520.060	6.460.302.189	3.057.461.305	9.517.763.494
7	Bengkulu	712.345.549	42.230.825	28.909.972	1.219.949.535	136.449.091	647.043.064	2.786.928.036	1.699.580.773	998.877.305	2.698.458.078
8	Lampung	2.842.286.479	125.017.499	32.776.464	1.732.551.921	571.540.326	1.715.146.783	7.019.319.472	4.551.254.975	2.416.103.473	6.967.358.448
9	Kepulauan Bangka Belitung	683.432.675	32.807.368	84.352.916	942.308.451	545.345.061	117.013.836	2.405.260.307	1.463.855.692	1.111.314.744	2.575.170.436
10	Kepulauan Riau	1.195.634.364	196.946.331	262.818.832	1.099.291.405	723.298.812	36.410.350	3.514.400.094	2.020.630.679	1.834.665.613	3.855.296.292
	Rata-Rata	2.403.424.581	284.446.153	332.806.606	1.560.575.365	1.555.982.955	1.037.586.665	7.174.822.325	4.569.313.812	2.482.812.188	7.052.126.000

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021, 2021

Instrumen belanja daerah yang dianggarkan oleh setiap Pemerintah Provinsi tentu direncanakan sesuai dengan tingkat kemandirian daerah tersebut yang ditunjukkan dari besaran anggaran pendapatan daerah. Ini artinya bahwa belanja daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pendanaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah harus dapat merefleksikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Sama halnya dengan perbedaan kemampuan belanja daerah antarprovinsi di Pulau Sumatera, anggaran pendapatan daerah antarprovinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 juga menunjukkan kondisi yang relatif beragam baik untuk jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Tabel 1.3, diketahui bahwa di tahun 2020 provinsi yang memiliki pendapatan cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera adalah Provinsi Aceh yaitu sebesar 14,440 triliun rupiah. Selain itu, terdapat beberapa provinsi lain yang juga memiliki pendapatan besar di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Adapun provinsi yang memiliki pendapatan terkecil di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 2,405 triliun rupiah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan kondisi fiskal yang signifikan antardaerah di Pulau Sumatera menunjukkan adanya ketimpangan fiskal.

Di pihak lain, secara umum kondisi fiskal yang terjadi di setiap provinsi menunjukkan pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, kecuali Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 pendapatan

terbesarnya berasal dari PAD dan Provinsi Aceh yang pendapatan terbesarnya berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, dana perimbangan antarprovinsi ternyata juga bervariasi pada tahun 2020, khususnya pada komponen dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

Pada tahun 2020 ada provinsi dengan dana bagi hasil (DBH) bukan pajak/sumber daya alam yang cukup besar seperti Provinsi Sumatera Selatan (1,082 triliun rupiah) dan Riau (1,076 triliun rupiah). Sementara, provinsi dengan DBH bukan pajak/sumber daya alam yang relatif kecil antara lain Provinsi Sumatera Barat (18,333 miliar rupiah), Bengkulu (28,910 miliar rupiah) dan Lampung (32,776 miliar rupiah). Karena pendapatan daerah yang bersumber dari DBH bukan pajak/sumber daya alam sangat ditentukan oleh besaran kontribusi hasil SDA daerah tersebut secara nasional (misalnya sektor migas) maka kondisi demikian telah mencerminkan adanya perbedaan atau disparitas kandungan sumber daya alam antarprovinsi di Pulau Sumatera, khususnya antara daerah penghasil dan bukan penghasil. Menurut Sjafrizal (2018) perbedaan kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah merupakan faktor yang menyebabkan ketimpangan yang terjadi di suatu daerah.

Selain itu, ada juga faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan di suatu daerah yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa tersebut menunjukkan kinerja perdagangan yang terjadi di suatu daerah. Thomas (2009) menyebut bahwa liberalisasi perdagangan telah terbukti

meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan. Jika mencermati kondisi perdagangan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang dilihat dari nilai ekspor dan impor yang dihasilkan oleh setiap provinsi maka diketahui bahwa nilai ekspor maupun impor antarprovinsi sangat bervariasi. Bahkan ada provinsi yang mengalami surplus atau defisit perdagangan. Kinerja perdagangan yang surplus menunjukkan bahwa kemampuan ekspor daerah tersebut lebih besar daripada impor. Sebaliknya, jika perdagangan suatu daerah defisit maka ini merupakan indikasi jumlah impor yang lebih besar daripada ekspor.

Pada tahun 2020 terdapat provinsi dengan nilai ekspor neto yang cukup besar dan menunjukkan surplus perdagangan yaitu seperti Provinsi Riau (146,833 triliun rupiah) dan Sumatera Utara (53,551 triliun rupiah). Sementara, provinsi dengan nilai ekspor neto yang kecil/negatif dan menunjukkan defisit perdagangan antara lain seperti Provinsi Bengkulu (-13,709 triliun rupiah) dan Aceh (10,796 triliun rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada data terlampir (Lampiran 2). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa situasi perdagangan antarprovinsi di Pulau Sumatera cukup beragam dan timpang.

Kinerja perdagangan yang beragam antarprovinsi di Pulau Sumatera terjadi karena adanya perbedaan keuntungan komparatif (*comparative advantage*) secara relatif yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga mendorong terjadinya spesialisasi produksi pada komoditas tertentu. Terjadinya spesialisasi produksi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan basis sektor ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, yang sekaligus juga menunjukkan potensi ekonomi dari setiap daerah. Oleh karena itu, basis/potensi ekonomi juga menjadi faktor

yang penting untuk mengakselerasi pembangunan suatu daerah dan menurunkan ketimpangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004) bahwa ketimpangan antardaerah dapat dikurangi jika Pemerintah di daerah yang bersangkutan menerapkan kebijakan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah.

Potensi/basis sektor ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera cenderung bervariasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sektor ekonomi yaitu basis sektor pertanian, industri, dan jasa, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar terlampir (Lampiran 3). Identifikasi terhadap sektor basis yang dimiliki setiap provinsi begitu penting untuk melihat persebarannya terkhusus dalam lingkup Pulau Sumatera serta menggali potensinya.

Selanjutnya, Sjafrizal (2018) mengungkapkan bahwa disparitas antardaerah yang terjadi juga dapat disebabkan oleh pemekaran wilayah baik terjadinya kemunduran kegiatan ekonomi pada daerah pemekaran baru maupun pada daerah lama (induk). Apabila dilihat dari sejarah pembentukan daerah otonom Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera hingga saat ini maka diketahui ada dua daerah otonom yang dapat dikatakan sebagai daerah yang relatif masih cukup muda/baru dibandingkan dengan daerah otonom lainnya. Daerah otonom tersebut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang dibentuk masing-masing pada tahun 2000 dan 2002, sebagaimana data terlampir (Lampiran 4). Pemekaran kedua daerah tersebut terjadi sejak diterbitkannya regulasi tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Thomas (2009) ketimpangan berdampak pada pertumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan akumulasi modal fisik dan manusia. Investasi berperan penting dalam mendorong proses pembangunan sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Situasi investasi di suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) setiap tahunnya.

Tabel 1.4
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Menurut Provinsi di
Pulau Sumatera Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

No.	Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	40.598	39.422	40.769	43.514	45.145
2	Sumatera Utara	135.208	142.014	150.803	163.244	161.328
3	Sumatera Barat	44.222	46.182	47.807	50.275	48.958
4	Riau	139.706	141.711	147.051	150.885	148.082
5	Jambi	29.039	30.128	30.778	31.894	32.227
6	Sumatera Selatan	101.310	107.288	111.301	113.186	114.605
7	Bengkulu	17.404	18.463	19.497	20.471	20.134
8	Lampung	67.779	72.862	79.145	82.805	78.715
9	Kep. Bangka Belitung	10.451	11.111	11.780	12.453	11.634
10	Kepulauan Riau	62.585	63.509	69.263	73.447	69.714
	Sumatera	648.302	672.689	708.196	742.176	730.543

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2016-2020, 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa nilai PMTB antarprovinsi di Pulau Sumatera relatif beragam selama kurun waktu antara tahun 2016-2020. Secara keseluruhan nilai PMTB Pulau Sumatera mencapai 730.543 miliar rupiah di tahun 2020. Dari angka tersebut provinsi yang memiliki nilai PMTB tertinggi adalah

Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 161.328 miliar rupiah. Sementara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai PMTB terkecil (11.634 miliar rupiah). Secara umum, seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami tren perkembangan kinerja PMTB yang semakin meningkat dalam periode tahun 2016-2020. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat investasi setiap provinsi di Pulau Sumatera terus mengalami peningkatan.

Tingkat investasi/modal (*capital*) menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, akan tetapi terdapat faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sesuai perkembangan teori pertumbuhan neoklasik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2006) bahwa model pertumbuhan neoklasik Solow menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja dan variabel ketiga yaitu teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Faktor tenaga kerja dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana dapat ditunjukkan dari kondisi angkatan kerja di suatu daerah dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dalam periode 2016-2020 diketahui TPAK sejumlah provinsi di Pulau Sumatera cukup bervariasi, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 5. Di tahun 2020 ada provinsi dengan angka TPAK yang tinggi seperti Provinsi Bengkulu (71,73%) dan Lampung (70,16%). Sementara, provinsi dengan angka TPAK yang relatif kecil antara lain Provinsi Riau (65,24%) dan Aceh (65,10%).

Di pihak lain, tingkat pengangguran di suatu daerah ditentukan salah satunya oleh faktor inflasi (Smit, *et. al.*, 1996). Apabila melihat kinerja inflasi antarprovinsi di Pulau Sumatera selama periode tahun 2016-2020 maka dapat

dikatakan cukup beragam sebagaimana data terlampir (Lampiran 6). Hal ini karena ada provinsi dengan tingkat inflasi yang rendah (di bawah 1%) dan ada provinsi dengan tingkat inflasi yang tinggi (lebih dari 5%). Bahkan ada provinsi yang mengalami deflasi. Namun demikian, secara umum tingkat inflasi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera relatif cukup baik dan stabil karena masih berada di bawah angka 5%. Rahardja & Manurung (2008) mengatakan umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Sementara, Samuelson & Nordhaus (2005) mengategorikan inflasi di bawah 10% sebagai *low inflation* atau disebut juga inflasi satu digit (*single digit inflation*).

Selanjutnya, tingkat pengangguran suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti tingkat pendidikan penduduk pada daerah bersangkutan. Todaro & Smith (2006) mengemukakan bahwa untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern, sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Oleh karena itu, tingkat permintaan terhadap pendidikan akan sangat tinggi. Tingkat pendidikan antarprovinsi di Pulau Sumatera yang ditunjukkan oleh indikator rata-rata lama sekolah relatif beragam berkisar antara 8% hingga 10% dalam kurun waktu antara tahun 2016-2020 (data terlampir).

Ketimpangan sekali lagi menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan (Stiglitz, 2012), yang melibatkan para pemimpin dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Amerika Serikat. Bahkan, pemerataan telah menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) pasca agenda pembangunan PBB Tahun 2015, dan kini fokus perang terhadap

kemiskinan telah bergeser ke arah perang melawan ketimpangan (Wei, 2017). Sejalan dengan konsensus global tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan dari 17 tujuan yang terkandung di dalam SDGs adalah Berkurangnya Kesenjangan/*Reduced Inequalities* (Tujuan 10). Dengan demikian, komitmen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk memberikan perhatian dan respon terhadap isu mengenai ketimpangan yang kini masih terjadi.

Ketimpangan antardaerah akan terus terjadi bahkan meningkat apabila tidak adanya implikasi kebijakan Pemerintah dalam menurunkan ketimpangan tersebut, baik dari sisi fiskal maupun distribusi pendapatan (Wardhana, dkk., 2013). Ketimpangan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah pun akan mengalami penurunan (Alesina & Rodrik, 1994). Sementara, pengangguran cenderung mengarah pada peningkatan ketimpangan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan jangka panjang akan lebih relevan apabila pengangguran yang tinggi dan terus-menerus dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan (Castells-Quintana & Royuela, 2012).

Sejumlah penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antarvariabel ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran telah menghasilkan temuan yang kuat adanya hubungan antara ketimpangan,

pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Lundberg & Squire (2003), Huang, *et al.* (2009) membuktikan bahwa secara simultan baik ketimpangan maupun pertumbuhan memiliki dampak negatif satu sama lain. Chemli & Smida (2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berjalan ke arah yang berlawanan. Sejalan dengan hal tersebut, Easterly (2007) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya, Lessmann (2009) menemukan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berdampak terhadap ketimpangan regional yang lebih tinggi. Tamai (2009) membuktikan bahwa ketimpangan dan pengangguran berkorelasi positif. Sementara, Thayaparan (2014) menemukan bahwa ada kausalitas dua arah antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang sama dilakukan oleh Kizys & Pierdzioch (2009), Ahmed & Wahid (2011) yang menemukan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Adapun Martin & Rogers (2000) melaporkan dampak negatif dan signifikan dari tingkat pengangguran rata-rata terhadap pertumbuhan ekonomi untuk negara-negara industri dan kawasan Eropa.

Konsep pengangguran dan pertumbuhan ekonomi keduanya begitu penting dalam hal perumusan kebijakan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator paling penting untuk mencapai target ekonomi makro bagi negara maju dan berkembang. Sementara konsep pengangguran merupakan indikator yang sangat penting dalam hal indikator sosial. Variabel-variabel ini menjadi penting karena keduanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

kehidupan ekonomi dan sosial (Soylu, 2018). Dengan demikian, variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat menjadi variabel penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan, khususnya kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

1.2. Rumusan Masalah

Profil mengenai ketimpangan dapat memberikan informasi tentang homogenitas dari berbagai kelompok hingga menjadi unsur yang penting dalam merancang intervensi kebijakan (Haughton & Khandker, 2012). Fenomena ketimpangan antardaerah yang terjadi di Pulau Sumatera merupakan situasi permasalahan pokok pembangunan yang harus diatasi dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak (*stakeholders*) karena implikasinya yang buruk bagi kelangsungan roda perekonomian. Sejalan dengan kondisi tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Sumatera secara umum cenderung mengalami perlambatan dan juga masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Ketiga variabel tersebut (ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran) merupakan variabel penting yang saling terkait berdasarkan teori maupun hasil riset terdahulu sehingga fokus penanganan terhadap permasalahan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sangat relevan.

Dalam kerangka sistem desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan eksekutor kebijakan dipandang perlu berupaya untuk menurunkan ketimpangan dan pengangguran, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Instrumen ini sebagai wujud dalam mendorong kemajuan dan

pemerataan pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, penduduk, perdagangan, sektor basis, sumber daya alam, dan pemekaran daerah terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
- b. Bagaimana pengaruh ketimpangan, tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
- c. Bagaimana pengaruh ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, desentralisasi fiskal, penduduk, perdagangan, sektor basis, sumber daya alam, dan pemekaran daerah terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
- b. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh ketimpangan, tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

- c. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, kontribusi penting penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan kawasan, adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi mengenai situasi ketimpangan antardaerah yang ditinjau dari sisi sektor basis ekonomi daerah, sumber daya alam, serta status pemekaran daerah.
- b. Mengembangkan model keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung antar variabel ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran serta variabel eksogen lainnya.
- c. Mengembangkan aplikasi teori ekonomi yang terkait dengan variabel ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi bagi pihak berkepentingan (*stakeholders*) dan pemangku kebijakan dalam melahirkan kebijakan yang

lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan ketimpangan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera.

- b. Sebagai bahan informasi dan *alternative literature* bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan model keterkaitan antara ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abida, Zouheir & Imen Mohamed Sghaier. (2012). Economic Growth and Income Inequality: Empirical Evidence from North African Countries. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 2, No. 1, pp. 142-154.
- Adelman, Irma & Cynthia Taft Morris. (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Ahmed, Abdullahi D. & Abu N.M. Wahid. (2011). Financial Structure and Economic Growth Link in African Countries: A Panel Cointegration Analysis. *Journal of Economic Studies*, Vol. 38, No. 3, pp. 331–357.
- Akai, Nobuo & Masayo Sakata. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for The United States. *Journal of Urban Economics*, Vol. 52, No. 1, pp. 93-108.
- _____. (2005). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States. CIRJE Discussion Paper.
- Akita, Takahiro. (1988). Regional Development and Income Disparities in Indonesia. *Asian Economic Journal*, Vol. 2 No. 2, pp. 165-191.

- _____. (2003). Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method. *Annals of Regional Science*, Vol. 37, No. 1, pp. 55–77.
- Alesina, Alberto & Dani Rodrik. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109, No. 2, pp. 465–490.
- Amar, Syamsul, Sutarmin Sutarmin & Dadang Prasetyo Jatmiko. (2017). The Effects of Economic Base and Economic Growth on Income Distribution in West Sumatra. *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 11, No. 2, pp. 652-659.
- Andiny, Puti & Pipit Mandasari. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, pp. 196-210.
- Arham, Muhammad Amir. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 14, No. 2, pp. 145-167.
- Armstrong, Harvey & Jim Taylor. (1993). *Regional Economics and Policy, Second Edition*. Great Britain: T.J Press (Padstow) Ltd.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017*. Jakarta: BPS.

_____. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Jakarta: BPS.

_____. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2013-2017*. Jakarta: BPS.

_____. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.

_____. (2020). *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: BPS.

_____. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. Jakarta: BPS.

Baltagi, Badi H., Byoung Cheol Jung & Seuck Heun Song. (2010). Testing for Heteroskedasticity and Serial Correlation in A Random Effects Panel Data Model. *Journal of Econometrics*, Vol. 154, No. 2, pp. 122–124.

Banda, Handson, Hlanganipai Ngirande, & Fortune Hogwe. (2016). The Impact of Economic Growth on Unemployment in South Africa: 1994-2012. *Investment Management and Financial Innovations*, Vol. 13, No. 2, pp. 246- 255.

Baransano, *et. al.* (2016). Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua. *Journal of Economics and Development Studies*, Vol. 4, No. 2, pp. 115-128.

- Bean, Charles & Christopher Pissarides. (1993). Unemployment, Consumption and Growth. *European Economic Review*, Vol. 37, No. 4, pp. 837–859.
- Bekti, Rokhana Dwi, *et. al.* (2014). Model Persamaan Simultan pada Analisis Hubungan Kemiskinan dan PDRB. *ComTech*, Vol. 5, No. 2, pp. 810-817.
- Birdsall, Nancy. (2000). *Why Inequality Matters: The Developing and Transitional Economies*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Bonet, Jaime. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience. *The Annals of Regional Science*, Vol. 40, No. 3, pp. 661-676.
- Borjas, George J. (2013). *Labor Economics (6th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Brodjonegoro, Bambang. (2003). *Three Years of Fiscal Decentralization in Indonesia: Its Impact on Regional Economic Development and Fiscal Sustainability*. Jakarta: Department of Economics, University of Indonesia.
- Case, Karl. E., Ray C. Fair, & Sharon. M. Oster. (2012). *Principles of Macroeconomics (10th ed.)*. Boston: Prentice Hall.
- Castells-Quintana, David & Vicente Royuela. (2012). Unemployment and Long-run Economic Growth: The Role of Income Inequality and Urbanisation. *Investigaciones Regionales*, Vol. 24, pp. 153–173.

- Castilho, Marta, Marta Menendez & Aude Sztulman. (2012). Trade Liberalization, Inequality, and Poverty in Brazilian States. *World Development*, Vol. 40, No. 4, pp. 821–835.
- Chan, Kenneth S., Xianbo Zhou, & Zhewen Pan. (2014). The Growth and Inequality Nexus: The Case of China. *International Review of Economics & Finance*, Vol. 34, pp. 230–236.
- Chatterjee, Satyajit & Dean Corbae. (2007). On The Aggregate Welfare Cost of Great Depression Unemployment. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 54, pp. 1529–1544.
- Chemli, Leila & Mounir Smida. (2013). Interaction between Poverty, Growth, and Inequality During The Crisis: A Panel Data Study. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 5, No. 5, pp. 120–130.
- Cheong, Tsun Se & Yanrui Wu. (2013). Globalization and Regional Inequality in China. *Economics Discussion/Working Papers 13-10*, The University of Western Australia, Department of Economics.
- Cherodian, Rowan & A. P. Thirlwall. (2015). Regional Disparities in Per Capita Income in India: Convergence or Divergence? *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37, No. 3, pp. 384–407.
- Cornia, Giovanni Andrea & Julius Court. (2001), *Inequality, growth and poverty in the era of liberalization and globalization*. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER) Policy Brief.

- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dernburg, Thomas F. & Karyaman Muchtar. (1992). *Makro-Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Dhrifi, Abdelhafidh. (2015). Financial Development and the “Growth-Inequality-Poverty” Triangle. *Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 6, No. 4, pp. 1163–1176.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, & Richard Startz. (2011). *Macroeconomics (11th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Ehrenberg, Ronald G. & Robert S. Smith. (2012). *Modern Labor Economics : Theory and Public Policy (11th ed.)*. Boston: Prentice Hall.
- Easterly, William. (2007). Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights from A New Instrument. *Journal of Development Economics*, Vol. 84, No. 2, 755-776.
- Ezcurra, Roberto & Pedro Pascual. (2008). *Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union Countries*, Environment and Planning A, Vol. 40, pp. 1185-1201.
- Fadli, Faishal. (2016). Analysis of Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Regional Disparity (Case Study of Provinces in

- Eastern and Western of Indonesia, 2006-2015). *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 6, No. 2, pp. 208-228.
- Fleisher, Belton, Haizheng Li, & Min Qiang Zhao. (2010). Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. *Journal of Development Economics*, Vol. 92, pp. 215–231.
- Frank, Mark W. (2008). Inequality and Growth in The United States: Evidence from A New State-Level Panel of Income Inequality Measures. *Economic Inquiry*, Vol. 47, No. 1, pp. 55-68.
- Fan C. Cindy & Mingjie Sun. (2008). Regional Inequality in China, 1978–2006. *Eurasian Geography and Economics*, Vol. 49, No. 1, pp. 1–20.
- Garrison, Charles B. & Albert S. Paulson. (1973). An Entropy Measure of the Geographic Concentration of Economic Activity. *Economic Geography*, Vol. 49, No. 4, pp. 319-324.
- Gie, The Liang. (1983). *Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid II*. Yogyakarta: Liberty.
- Güçlü, Mehmet. (2017). Regional Unemployment Disparities in Turkey. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, Vol. 2, pp. 94-108.
- Guiga, Housseima & Jaleddine Ben Rejeb. (2012). Poverty, Growth and Inequality in Developing Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 2, No. 4, pp. 470-479.

- Gravier-Rymaszewska, Joanna, Joanna Tyrowicz, & Jacek Kochanowicz. (2010). Intra-provincial inequalities and economic growth in China. *Economic Systems*, Vol. 34, No. 3, 237–258.
- Harouche, Mohammed & Hassan Bougantouche. (2015). The Impact of Fiscal Decentralization and Budgetary Deconcentration on Regional Disparities in Morocco. *IOSR Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 3, pp. 25-34.
- Harris, John R., and Michael P. Todaro, (1970). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. *American Economic Review*, Vol. 60, No. 1, pp. 126-142.
- Haughton, Jonathan & Shahidur R. Khandker. (2012). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington, DC: The World Bank.
- Hossain, Sharif M. (2013). Does Economic Development Require More Income Inequality? Is the Kuznets Curve Still Valid? *Developing Country Studies*, Vol. 3, No. 8, pp. 196-205.
- Huang, Ho-Chuan (R.), Yi-Chen Lin, & Chih-Chuan Yeh. (2009). Joint Determinations of Inequality and Growth. *Economics Letters*, Vol. 103, pp. 163–166.
- International Labor Organization. (1982). *Resolution Concerning Statistics of The Economically Active Population, Employment, Unemployment and*

Underemployment. This paper adopted by the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians.

Iradian, Garbis. (2005). *Inequality, Poverty, and Growth: Cross-Country Evidence*. IMF Working Paper.

Istrate & Horea-Serban. (2018). The Dynamics of Poverty and Its Consequences on Regional Inequalities in Romania. *Eastern Journal of European Studies*, Vol. 9, No. 1, pp. 63-86.

Jhingan, M. L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kefi, Mohamed Karim & Hadhek Zouhaier. (2012). Inequality and Economic Growth. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 2, No. 8, pp. 1013-1025.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Pembentukan Daerah-Daerah di Indonesia sampai dengan Tahun 2014*.

Khan, Muhammad Azhar, *et. al.* (2014). Global Estimates of Growth–Inequality–Poverty (GIP) Triangle: Evidence From World Bank’s Classification Countries. *Qual Quant*, Vol. 48, pp. 2631–2646.

Khan, Rana Ejaz Ali & Nadia Bashir. (2011). Trade Liberalization, Poverty and Inequality Nexus: A Case Study of India. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 1, No. 3, pp. 114-119.

- Kizys, Renatas & Christian Pierdzioch. (2009). Changes in The International Comovement of Stock Returns and Asymmetric Macroeconomic Shocks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol. 19, No. 2, pp. 289–305.
- Klasen, Stephan. (2005). *Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement and Policy Issues*. OECD Development Centre Working Paper No. 246. Paris: OECD.
- Kreishan, Fuad M. (2011). Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis, *Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 2, pp. 228-231.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan – Akademi Manajemen Perusahaan UPP STIM YKPN.
- _____. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad & Nova Murbarani. (2016). Regional Inequality in Indonesia, 1994-2012. *The Business and Management Review*, Vol. 8, No. 1, pp. 38-52.

- Kurita, Kyosuke & Takashi Kurosaki. (2011). Dynamics of Growth, Poverty and Inequality: A Panel Analysis of Regional Data from Thailand and the Philippines. *Asian Economic Journal*, Vol. 25, No. 1, pp. 3-33.
- Kyriacou, Andreas P., *et. al.* (2015). Fiscal Decentralization and Regional Disparities: The Importance of Good Governance. *Papers in Regional Science*, Vol. 94, No. 1, pp. 89-107.
- Lessmann, Christian. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-Section and Panel Data. *Environment and Planning*, Vol. 41, No. 10, pp. 2455-2473.
- _____. (2012). Regional Inequality and Decentralization-An Empirical Analysis. *Environment and Planning*, Vol. 44, pp. 1363-1388.
- Li, Chang-shuai & Zi-juan Liu. (2012). Study on The Relationship among Chinese Unemployment Rate, Economic Growth and Inflation. *Advance in Applied Economics and Finance*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-6.
- Li, Yingru & Y.H. Dennis Wei. (2010). The Spatial-Temporal Hierarchy of Regional Inequality of China. *Applied Geography*, Vol. 30, pp. 303–316.
- Lundberg, Mattias & Lyn Squire. (2003). The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality. *The Economic Journal*, Vol. 113, pp. 326–344.

- Makaringe, Sibusiso Clement & Hlalefang Khobai. (2018). *The Effect of Unemployment on Economic Growth in South Africa (1994-2016)*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Macroeconomics 6th Edition*. New York: Worth Publishers.
- Martin, Philippe & Carol Ann Rogers. (2000). Long-Term Growth and Short-Term Economic Instability. *European Economic Review*, Vol. 44, No. 2, pp. 359-381.
- Martinez-Vazquez, Jorge & Andrey Timofeev. (2010). Decentralization Measures Revisited. *Public Finance and Management*, Vol. 10, No. 1, pp. 13-47.
- McEachern, William A. (2000). *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukhlis, *et. al.* (2017). Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, and Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 7, No. 4, pp. 214-224.
- Muinel-Gallo, *et. al.* (2016). Intergovernmental Transfers and Regional Income Inequalities: an Empirical Analysis of Uruguay. *Review of Public Economics*, Vol.4, pp. 9-34.

- Myrdal, Gunnar. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Gerald Duckworth.
- Nachrowi, D.N, dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nafziger, E. Wayne. (2006). *Economic Development (4th ed.)*. New York: Cambridge University Press.
- Nayyar, Gaurav. (2005). Growth and Poverty in Rural India: An Analysis of Inter-State Differences. *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 16, pp. 1631-1639.
- Nickell, Stephen. (1990). Unemployment: A Survey. *The Economic Journal*, Vol. 100, No. 401, pp. 391-439.
- Nikoloski & Gveroski. (2017). Assessing the poverty-growth-inequality nexus: the case of Macedonia. *Eastern Journal of European Studies*, Vol. 8, No. 1, pp. 29-43.
- Nindi & Odhiambo. (2015). Poverty and Economic Growth in Swaziland: An Empirical Investigation. *Managing Global Transitions*, Vol. 13, No. 1, pp. 59-74.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

- Ogbeide, Evelyn Nwamaka Osaretin & David Onyinyechi Agu. (2015). Poverty and Income Inequality in Nigeria: Any Causality? *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 5, No. 3, pp. 439-452.
- Osinubi, Okunbo Simbowale. (2005). Macroeconometric Analysis of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 43, No. 2, pp. 249-269.
- Perugini, Cristiano & Gaetano Martino. (2008). Income Inequality within European Regions: Determinants and Effects on Growth. *Review of Income and Wealth*, Vol. 54, No. 3, pp. 373-406.
- Prachowny, Martin F. J. (1993). Okun's Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 75, No. 2, pp. 331-336.
- Qian, Yingyi & Barry R. Weingast. (1997). Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 11, No. 4, pp. 83-92.
- Qiao, Baoyun, *et. al.* (2008). The Tradeoff Between Growth and Equity in Decentralization Policy: China's Experience. *Journal of Development Economics*, Vol. 86, pp. 112-128.
- Rahardja, Prathama & Mandala Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ravallion, Martin (1997). Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty? *Economics Letters*, Vol. 56, No. 1, pp. 51–57.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.*

_____, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 217 K/80/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200 K/80/MEM/2019 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi untuk Tahun 2020.*

Richardson, Harry W. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan buku Elements of Regional Economics)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rodríguez-Pose, Andrés. (2012). Trade and Regional Inequality. *Economic Geography*, Vol. 88, No. 2, pp. 109–136.

Rodríguez-Pose, Andrés, Sylvia A. R. Tijmstra, & Adala Bwire. (2009). Fiscal Decentralisation, Efficiency, and Growth. *Environment and Planning A*, Vol. 41, No. 9, pp. 2041–2062.

Romer, David. (2012). *Advanced Macroeconomics (4th ed.)*. New York: McGraw-Hill.

- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (2005). *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Sepulveda, Cristian F. & Jorge Martinez-Vazquez. (2011). The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 29, pp. 321-343.
- Shankar, Raja & Anwar Shah. (2003). Bridging the Economic Divide within Countries: A Scorecard on the Performance of Regional Policies in Reducing Regional Income Disparities. *World Development*, Vol. 31, No. 8, pp. 1421-1441.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Smit, P. C., et. al. (1996). *Economics: A South African Perspective*. Lansdowne: Juta and Company Ltd.
- SMERU (2021). *Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Soenandar, Ersi S. (2005). Government Policy in Solving Uneven Regional Development between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *Economic Journal*, Vol. 34, pp. 171-192.

- Soylu, Özgür Bayram, İsmail Çakmak, & Fatih Okur. (2018). Economic Growth and Unemployment Issue: Panel Data Analysis in Eastern European Countries. *Journal of International Studies*, Vol. 11, No. 1, pp. 93-107.
- Stiglitz, Joseph E. & Walsh, C.E. (2006). *Economics* (4th ed.). New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Stiglitz, Joseph E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan & Widyanti. (2007). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwanan, Ahmad Fawaiq & Sulistiani, Eka Heni. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia; A Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 24, No. 3, pp. 328-336.
- Tamai, T. (2009). Inequality, Unemployment, and Endogenous Growth in A Political Economy with A Minimum Wage. *Journal of Economics*, Vol. 97, No. 3, pp. 217–232.
- Tambunan, Tulus. (2014). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Thalassinos, et. al. (2012). Income Inequality and Inflation in The EU. *European Research Studies*, Vol. 15, No. 1, pp. 127-140.

- Thayaparan, A. (2014). Impact of Inflation and Economic Growth on Unemployment in Sri Lanka: A Study of Time Series Analysis. *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 13, No. 5.
- Thomas, Vinod. (2009). Income Disparity and Growth. *Global Journal of Emerging Market Economies*, Vol. 1, No. 1, pp. 63–86.
- Thornton, John. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics*, Vol. 61, pp. 64–70.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi – Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Tselios, Vassilis, *et. al.* (2012). Income Inequality, Decentralisation, and Regional Development in Western Europe. *Environment and Planning A*, Vol. 44, pp. 1278-1301.
- Wan, Guanghua, Ming Lu & Zhao Chen. (2006). The Inequality–Growth Nexus in The Short and Long Run: Empirical Evidence from China. *Journal of Comparative Economics*, Vol. 34, No. 4, pp. 654–667.
- Wardhana, Adhitya, dkk. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, Vol. 15, No. 2, pp. 111-118.

- Wei, Yehua Dennis. (2017). Geography of Inequality in Asia. *Geographical Review*, Vol. 107, No. 2, pp. 263–275.
- Wijayanto. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 02, pp. 418-428.
- Williamson, Jeffrey G. (1965). Regional Inequality and The Process of National Development: A Description of The Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, Vol. 13, No. 4, pp. 1-84.
- Williams, Christine, Mirko Draca & Christine Smith. (2003). *Productivity and Regional Economic Performance in Australia*. Brisbane: Office of Economic and Statistical Research.
- Zakaria, Syawal. (2013). The Impact of Fiscal Decentralization toward Regional Inequalities in Eastern Region of Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 4, No. 10, pp. 74-84.
- Zaman & Bashir Ahmad Khilji. (2013). The Relationship between Growth–Inequality–Poverty Triangle and Pro-Poor Growth Policies in Pakistan: The Twin Disappointments. *Economic Modelling*, Vol. 30, pp. 375–393.